

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN**  
**KECAMATAN TURI**  
**DESA GEGER**

Jl. RA. Kartini No. 279 Desa Geger Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan 62252

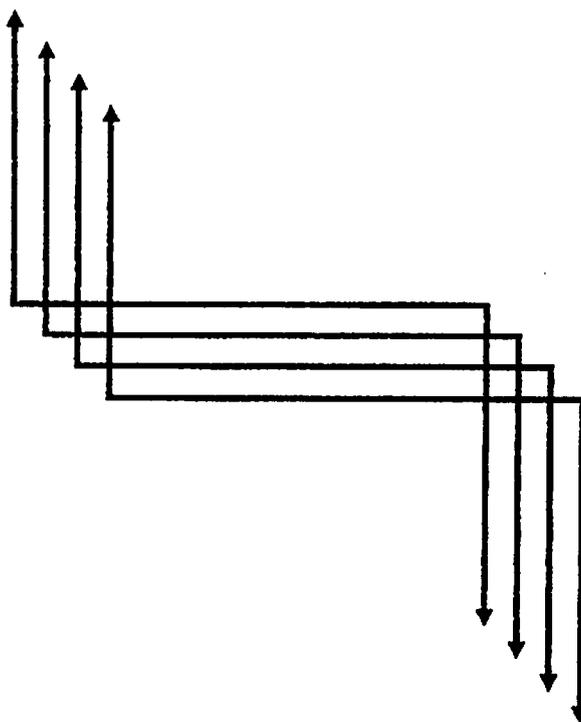
---

**PERATURAN DESA GEGER KECAMATAN TURI**  
**KABUPATEN LAMONGAN**

NOMOR 01 TAHUN 2014

*TENTANG*

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GEGER.**  
**TAHUN ANGGARAN 2014**



**TAHUN ANGGARAN 2014**

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN**  
**KECAMATAN TURI**  
**DESA GEGER**

Jl. RA. Kartini No. 279 Desa Geger Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan 62252

---

**PERATURAN DESA GEGER KECAMATAN TURI KABUPATEN LAMONGAN**  
**NOMOR 01 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GEGER.**  
**TAHUN ANGGARAN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA GEGER**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ... Tahun Anggaran 2012 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat :
  1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Geger . Nomor 03 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DESA GEGER. TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA . GEGER TAHUN ANGGARAN 2014.

**Pasal 1**

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Geger.Tahun Anggaran 2014 sejumlah Rp. 901.734.000 ( Sembilan ratus satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah ).

**Pasal 2**

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- |                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| a. Pendapatan     | Rp. 901.734.000 ,-  |
| b. Belanja        |                     |
| 1) Langsung       | Rp. 514.530.000,-   |
| 2) Tidak Langsung | Rp. 387.204.000,-   |
| c. Pembiayaan     |                     |
| 1) Penerimaan     | Rp. 901.734.000 ,-. |
| 2) Pengeluaran    | Rp. 901.734.000 ,-. |

**Pasal 3**

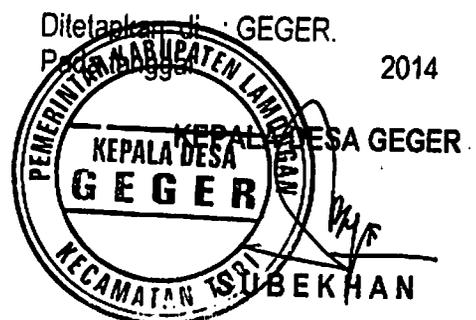
Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

**Pasal 4**

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

**Pasal 5**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan



Lampiran I : Perdes .....  
 Nomor :  
 Tanggal :  
 Perihal : APBDesa

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 DESA GEGER KECAMATAN TURI  
 TAHUN ANGGARAN 2014**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>			
1.1	Pendapatan Asli Desa	288,040,000	226,180,000	
1.1.1	Hasil Usaha Desa	98,000,000	104,700,000	
1.1.1.1	Hasil Usaha Koperasi Wanita	1,000,000	1,500,000	
1.1.1.2	Hasil Usaha PKK ( Simpan piam PKK dan P 3 EL )	1,000,000	4,800,000	
1.1.1.3	BUMDes Air Bersih	96,000,000	98,400,000	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	143,600,000	71,020,000	
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	143,500,000	71,020,000	
1.1.2.1.1	Hasil Tanah Kas Desa	92,000,000		
1.1.2.1.2	Hasil Tanah Bengkok	51,500,000		
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	17,600,000	20,000,000	
1.1.3.1	Swadaya Penunjang ADD dan BANSUN	2,500,000	2,500,000	
1.1.3.2	Swadaya Penunjang Pemb.Jalan Poros	5,000,000	5,000,000	
1.1.3.3	Swadaya Pembangunan Balai desa			
1.1.3.4	Swadaya Pembangunan Gedung TK	8,000,000	0	
1.1.3.5	swadaya Pembangunan Drainase ( SPAL )	0	8,500,000	
1.1.3.6	Swadaya Pemilik Sawah	2,000,000	4,000,000	
1.1.4	Hasil Gotong Royong	14,000,000	14,000,000	
1.1.4.1	Nilai Tenaga Gotong-Royong yang diuangkan	14,000,000	14,000,000	
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	15,040,000	16,460,000	
1.1.5.1	Biaya Administrasi Surat Menyurat	7,500,000	6,900,000	
1.1.5.2	Pompa air (diesel)	0	0	
1.1.5.3	Pungutan Sumbangan Pendiri Bangunan	0	0	
1.1.5.4	Pungutan Beli kendaraan roda 4	0	0	
1.1.5.5	Pungutan Beli kendaraan roda 2	0	0	
1.1.5.6	Pungutan beli pompa air	0	0	
1.1.5.7	Pungutan Warung dan UKM diatas lahan Desa	0	3,000,000	
1.1.5.8	Pungutan jual beli Rojokoyo	0	0	
1.1.5.9	Pungutan pracangan / pengusaha	0	0	
1.1.5.10	Pungutan ijin keramaian / kesenian	1,800,000	800,000	
1.1.5.11	Pungutan beli sawah sewa tahunan	240,000	240,000	
1.1.5.12	Pungutan jual beli sawah / balik nama( 1 % Penjual 2.5 % Pembeli )	2,500,000	3,000,000	
1.1.5.13	Pungutan NTCR	1,200,000	720,000	
1.1.5.14	Pungutan pergi luar negeri	0	0	
1.1.5.15	Pungutan kijingan dimakam	0	0	
1.1.5.16	Hasil Infaq dan shodakoh ( BAZIS )	1,800,000	1,800,000	
1.2	Bagi Hasil Pajak :	4,000,000	4,000,000	
1.2.1	Bagi hasil pajak kabupaten/kota	-	-	
1.2.2	Bagi hasil PBB (64.8x10%) x baku	4,000,000	4,000,000	
1.3	Bagi Hasil Retribusi	-	-	
1.3.1				
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	226,000,000	357,000,000	
1.4.1	ADD	51,500,000	51,500,000	
1.4.2	Bansun	5,500,000	5,500,000	

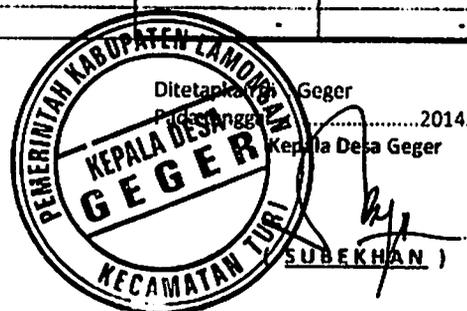
1.4.3	PNPM-MP	169,000,000	300,000,000
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya	342,500,000	74,650,000
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat	250,000,000	-
1.5.1.1	Pembangunan Jalan Lingkungan ( PPIP )	250,000,000	
1.5.1.2			
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi		
1.5.2.1	Pembangunan Kantor/Balai Desa ( BKD )		
1.5.2.2			
1.5.2.3			
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	92,500,000	74,650,000
1.5.3.1	TPAPD Kepala Desa	10,800,000	12,000,000
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa	46,200,000	54,000,000
1.5.3.3	TPBPD	4,500,000	5,650,000
1.5.3.4	Bantuan Pembangunan Kantor/Balai Desa	30,000,000	0
1.5.3.5	Bantuan puma Bhakti Perangkat Desa	0	2,000,000
1.5.3.6	Asuransi Kepala Desa	1,000,000	1,000,000
1.5.3.7	Pemb.Jalan / jembatan / Saluran Drainase		
1.5.3.8	Bantuan Uang Duka Kepala Desa		
1.5.3.9	Bantuan Uang Duka Sekretaris Desa		
1.5.3.10	Bantuan Uang Duka Prangkat desa lainnya		
1.5.3.11	Bantuan Pemilihan Kepala Desa		
1.5.3.12	Bantuan Pembentukan BPD		
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :	-	-
1.6	Hibah	291,336,000	239,904,000
1.6.1	Hibah dari pemerintah ( RASKIN )	231,336,000	239,904,000
1.6.2	Hibah dari pemerintah propinsi	-	-
1.6.3	Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota	60,000,000	0
1.6.3.1	Jalan Poros Desa	60,000,000	0
1.6.3.2	Air Bersih	0	-
1.6.4	Hibah dari badan/organisasi/swasta	-	-
1.6.5	Hibah dan kelompok masyarakat perorangan	-	-
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga	-	-
	Sumbangan untuk pengisian perangkat Desa		
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b> (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	<b>1,151,876,000</b>	<b>901,734,000</b>

901,734,000

1	2	3	4	5
2	<b>BELANJA</b>			
2.1	<b>Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)</b>	<b>778,550,000</b>	<b>514,530,000</b>	
2.1.1	<b>Belanja Pegawai/Honorarium</b>	<b>34,550,000</b>	<b>49,770,000</b>	
2.1.1.1	Honorarium Petugas team teknis,dan lainnya	9,600,000	9,600,000	
2.1.1.2	Honorarium Petugas HIPAMS	12,000,000	12,000,000	
2.1.1.3	Honorarium Team Teknis pasca Insidentil	500,000	500,000	
2.1.1.4	Honorarium Petugas K 3 L Balai Desa	1,000,000	1,020,000	
2.1.1.5	Honorarium PKK	0	3,000,000	
2.1.1.6	Honorarium Kader Posyandu	0	600,000	
2.1.1.7	Honorarium Sub PKBD	0	0	
2.1.1.8	Honorarium Kader Desa Siaga	300,000	2,300,000	
2.1.1.9	Honorarium 18 Ketua RT	5,400,000	13,500,000	
2.1.1.10	Honorarium 3 Ketua RW ( Pemb.kasun )	0	0	
2.1.1.11	Honorarium Pengurus LPM	1,000,000	1,000,000	
2.1.1.12	Honorarium modin	750,000	2,250,000	
2.1.1.13	Honorarium petugs PBB	4,000,000	4,000,000	
2.1.1.14	Bantuan Transport KPMD (Kader pemb Masy. Desa)		480,000	
2.1.1.15	Bantuan Transport KT (Kader Teknik)		480,000	
2.1.2	<b>Belanja Barang/Jasa</b>	<b>744,000,000</b>	<b>464,760,000</b>	
2.1.2.1	<b>Belanja perjalanan dinas</b>	<b>1,610,000</b>	<b>1,610,000</b>	
2.1.2.1.1	Belanja perjalanan dinas Kepala Desa	300,000	300,000	
2.1.2.1.2	Belanja perjalanan dinas Sekdes	200,000	200,000	
2.1.2.1.3	Belanja perjalanan dinas Kasun,Kasi,Kaur	480,000	480,000	
2.1.2.1.4	Belanja perjalanan dinas Lembaga	480,000	480,000	
2.1.2.1.5	Belanja perjalanan dinas PKBD / Sub PKBD	150,000	150,000	
2.1.2.1.6	Belanja / Santunan rawap inap	1,000,000	1,000,000	
2.1.2.2	<b>Belanja bahan/material</b>	<b>733,390,000</b>	<b>447,550,000</b>	
2.1.2.2.1	Pembiayaan ATK	1,500,000	1,500,000	
2.1.2.2.2	Peralatan Kantor	1,000,000	1,000,000	
2.1.2.2.3	Perlengkapan Kantor,komputer,print	7,000,000	2,000,000	
2.1.2.2.4	Biaya rapat rapat	1,200,000	1,200,000	
2.1.2.2.5	Pembayaran Rekening Listrik	180,000	180,000	
2.1.2.2.6	Pemeliharaan gedung / kantor	3,000,000	1,000,000	
2.1.2.2.7	Pemeliharaan Jalan Desa	1,000,000	1,000,000	
2.1.2.2.8	Pemeliharaan Plensengan dan Tanggul Desa	1,000,000	1,000,000	
2.1.2.2.10	Pengurukan Lokasi Balai Desa	1,500,000		
2.1.2.2.11	Biaya bahan /material JAMPORDES	60,000,000	0	
2.1.2.2.12	Biaya bahan /material ADD	35,000,000	35,000,000	
2.1.2.2.13	Pagar makam ( Bansun )	5,500,000	5,500,000	
2.1.2.2.14	Pembayaran Rekening Air	120,000	120,000	
2.1.2.2.15	Pembelian inventaris Desa( Mobiler )	0		
2.1.2.2.16	Pemeliharaan Motor Dinas	500,000	500,000	
2.1.2.2.17	Perbaikan,pemeliharaan Ruangan BALAI DESA	2,500,000	1,000,000	
2.1.2.2.18	Perbaikan Mesin pompa HIPAMS dan Sumber M.air	45,000,000	45,000,000	
2.1.2.2.19	Pembegoan Kali keliliq Desa dan padat Karya,BOP	54,790,000	0	
2.1.2.2.20	Pembelian Tiang Lampu,	7,600,000	1,050,000	
2.1.2.2.21	Biaya Operasional Pemasangan dan pembelian lampu	1,000,000	500,000	
2.1.2.2.22	Dana Aman pemeliharaan HIPAMS( Mesin dan Sumber)	60,000,000	50,000,000	
2.1.2.2.23	Belanja Material Pembangunan Balai Desa	25,000,000	0	
2.1.2.2.24	Belanja Material Pemb. Gedung TK (2013)SPAL ( 2014).PNPM-MP	169,000,000	300,000,000	
2.1.2.2.25	Belanja Material PPIP	250,000,000		

2.1.2.3	<b>Biaya Operasional</b>	<b>9,000,000</b>	<b>15,600,000</b>
2.1.2.3.1	Biaya MAD I (Sosialisasi PNPM MPD)		500,000
2.1.2.3.2	Biaya MD III (Sosialisasi PNPM MPD)		600,000
2.1.2.3.3	Biaya Musdus dan MKP tingkat Dusun PNPM MPD		300,000
2.1.2.3.4	Biaya MDKP (musyawarah Desa Khusus Perempuan)		400,000
2.1.2.3.5	Biaya MD IV (Preencanaan PNPM MPD)		1,500,000
2.1.2.3.6	Biaya MD I (Musrenbangdes)		1,000,000
2.1.2.3.7	Biaya MD II (Informasi hasil MAD penetapan) PNPM MPd		300,000
2.1.2.3.8	Biaya Pra Pelaksanaan (Pelaksanaan Lelang) PNPM MPd		500,000
2.1.2.3.9	Biaya Swadaya Kegiatan PNPM MPd	8,000,000	8,500,000
2.1.2.3.10	Biaya Pemeliharaan dan Pelestarian Pemb. Asset PNPM MPd	1,000,000	2,000,000
2.1.3	<b>Belanja Modal</b>	-	-
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah	-	-
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan (listrik/air)	-	-
2.2	<b>Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)</b>	<b>373,326,000</b>	<b>387,204,000</b>
2.2.1	<b>Belanja Pegawai/penghasilan tetap</b>	<b>127,700,000</b>	<b>130,650,000</b>
2.2.1.1	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kades	35,300,000	40,000,000
2.2.1.1.1	Penghasilan tetap Kepala Desa	24,500,000	28,000,000
2.2.1.1.2	TPAPD Kepala Desa	10,800,000	12,000,000
2.2.1.2	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Sekdes	4,000,000	4,000,000
2.2.1.2.1	Tunjangan kinerja Sekretaris Desa	4,000,000	4,000,000
2.2.1.2.2	TPAPD Sekretaris Desa		
2.2.1.3	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kasun	12,600,000	15,000,000
2.2.1.3.1	Penghasilan tetap Kepala Dusun	6,000,000	6,000,000
2.2.1.3.2	TPAPD Kepala Dusun	6,600,000	9,000,000
2.2.1.4	Belanja Peg/penghasilan tetap Kaur/Kasi	70,400,000	65,000,000
2.2.1.4.1	Penghasilan tetap Kaur/Kasi	20,000,000	20,000,000
2.2.1.4.2	TPAPD Kasi / Kaur	50,400,000	45,000,000
2.2.1.5	Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD	5,400,000	6,650,000
2.2.1.5.1	Representatif BPD	1,000,000	1,000,000
2.2.1.5.2	Tunjangan BPD	4,400,000	5,650,000
2.2.2	<b>Belanja Hibah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.2.2.1	Jalan Desa		0
2.2.2.2	Air Bersih		-
2.2.3	<b>Belanja Bantuan Sosial</b>	<b>236,836,000</b>	<b>249,244,000</b>
2.2.3.1	Kegiatan PHBN/PHBI	1,000,000	1,000,000
2.2.3.3	Lomba Desa	1,000,000	1,000,000
2.2.3.4	Pemeliharaan Masjid	0	2,400,000
2.2.3.5	Kegiatan Posyandu	2,000,000	2,000,000
2.2.3.6	Kegiatan Bersih Desa / Ritual Desa	1,500,000	1,500,000
2.2.3.7	Bantuan pada pemilik BIMBEL	0	720,000
2.2.3.8	Bantuan Pada Guru Ngaji, TPQ	0	720,000
2.2.3.9	RASKIN		
		231,336,000	239,904,000

1	2	3	4	5
2.2.4	<b>Belanja Bantuan Keuangan</b>	<b>7,290,000</b>	<b>5,910,000</b>	
2.2.4.1	Operasional Pemerintahan Desa	600,000	600,000	
2.2.4.2	Operasional BPD	1,500,000	1,500,000	
2.2.4.3	Operasional LPM dan PKK	1,000,000	1,000,000	
2.2.4.4	Operasional Penanggung jawab Bandes	260,000	260,000	
2.2.4.5	Operasional PJOK	240,000	240,000	
2.2.4.6	Operasional PJAK	210,000	210,000	
2.2.4.7	Operasional RT	1,480,000	0	
2.2.4.8	Operasional Linmas	1,000,000	1,000,000	
2.2.4.9	Operasional Kelompok Tani / HIPPA	1,000,000	1,000,000	
2.2.5	<b>Belanja tak terduga</b>	<b>1,500,000</b>	<b>1,500,000</b>	
2.2.5.1	Kegiatan Pilgub	1,000,000	-	
2.2.5.2	Kegiatan Pileg dan Pilpres	-	1,000,000	
2.2.5.3	Bencana Alam	-	-	
2.2.5.4	Keadaan Darurat, orang sakit, gila, mabuk.	500,000	500,000	
	<b>JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)</b>	<b>1,151,876,000</b>	<b>901,734,000</b>	
			901.734,000	
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>			
3.1	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>			
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya	-	-	
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan	-	-	
3.1.3	Penerimaan Pinjaman	-	-	
3.2	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	-	-	
3.2.3	Pembayaran Hutang	-	-	
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)</b>			



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN**  
**KECAMATAN TURI**  
**DESA GEGER**

Jl. RA. Kartini No. 279 Desa Geger Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan 62252

---

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**  
**( BPD )**  
**DESA GEGER KECAMATAN .TURI**  
**KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEGER. KECAMATAN TURI.  
NOMOR : 188/ .D.I. /413.302.05.1/2014

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA .GEGER TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GEGER.  
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEGER**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa .Geger tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .Geger. Tahun Anggaran 2014 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor / );
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);  
 17. Peraturan Desa Geger Nomor 02 Geger. Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa .Geger .. membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .Geger. tahun anggaran 2014.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GEGER TAHUN ANGGARAN 2014.**

**Pasal 1**

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Geger Tahun Anggaran 2014.

**Pasal 2**

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

**Pasal 3**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di GEGER ..  
 Pada tanggal 5-6 - 2014

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEGER.**

